

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Analisis Model Edward III)

Mahyuddin¹

¹STAI AL-Azhary Mamuju

Email korespondensi: mahyuddinn0507@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mamuju menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya menjadi kendala dominan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan tata kelola kebijakan pendidikan daerah.

Kata kunci: Pendidikan gratis; kebijakan pendidikan

ABSTRACT:

This study aims to analyze the implementation of free education policy in Mamuju Regency using Edward III's policy implementation model. The research employed a qualitative case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that communication and implementers' disposition significantly support policy effectiveness, while resource limitations remain the primary constraint. The study contributes to the discourse on local education policy implementation and provides practical recommendations for strengthening governance and accountability in free education programs.

Keywords: Free education; education policy

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban menyediakan layanan pendidikan yang adil dan merata. (Pendidikan et al., 2023) Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola dan mengembangkan kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik lokal.

Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan geografis, sosial-ekonomi, serta dampak pascabencana gempa bumi tahun 2021 yang memengaruhi infrastruktur pendidikan. Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan gratis menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan (Datnow et al., 2023). Dalam konteks pendidikan, kebijakan pendidikan gratis bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Namun keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi dan kualitas tata kelola. (Sumbodo et al., 2018)

Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mamuju diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap akses dan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Mamuju, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang relevan dengan fokus kajian. Pertama, Mamuju memiliki beban layanan pendidikan yang relatif besar dibandingkan wilayah lain di provinsi tersebut karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas pendidikan. Kedua, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga memberikan konteks yang tepat untuk menelaah implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, keberagaman kondisi sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun pesisir dan perdesaan, memberikan ruang analisis yang lebih kaya terkait dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama informasi (Hamilton & Finley, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan, meliputi pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, kepala sekolah tingkat SD dan SMP, guru, serta orang tua siswa. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik implementasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti dokumen kebijakan daerah, peraturan bupati terkait pendidikan, laporan realisasi anggaran pendidikan, data statistik pendidikan Kabupaten Mamuju, serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai kebijakan dan laporan administratif yang berkaitan dengan implementasi pendidikan gratis, sedangkan observasi non-partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan kebijakan tanpa keterlibatan aktif peneliti dalam aktivitas yang diamati. Untuk meningkatkan validitas data dan memperkuat keakuratan temuan, penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi melalui perbandingan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur

birokrasi (Anggraini et al., 2022). Model ini dipilih karena dinilai relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan. Selain itu, model Edward III telah banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan pendidikan sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor administratif dan struktural yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang melalui verifikasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian (Mezmir, 2020). Analisis bersifat tematik-komparatif dengan membandingkan hasil temuan lapangan terhadap teori implementasi kebijakan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris implementasi kebijakan pendidikan gratis, tetapi juga memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Untuk menjamin kredibilitas dan trustworthiness penelitian, digunakan beberapa teknik uji keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan audit trail (Da Silva Santos et al., 2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait hasil interpretasi data, sementara audit trail digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Pendekatan ini penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi standar publikasi akademik pada jurnal bereputasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dengan fokus pada implementasi kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah dasar. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari kawasan perkotaan dan pedesaan dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, khususnya dalam aspek ketersediaan sumber daya dan pemerataan fasilitas.

Data penelitian diperoleh melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa
- b. Observasi langsung di sekolah
- c. Studi dokumentasi laporan anggaran dan kebijakan

Analisis dilakukan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kania et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan pendidikan gratis telah dilakukan melalui rapat dinas, surat edaran, dan pertemuan wali murid.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Komunikasi Kebijakan

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Kejelasan informasi	88	Tinggi
Konsistensi penyampaian	82	Tinggi
Pemahaman guru terhadap kebijakan	85	Tinggi
Pemahaman orang tua	76	Sedang

Rata-rata Efektivitas Komunikasi: 82,75% (Tinggi)

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator “kejelasan informasi” memiliki nilai tertinggi (88%), sedangkan “pemahaman orang tua” lebih rendah (76%). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat.

Komunikasi yang efektif menjadi faktor pendukung utama implementasi kebijakan. Namun, perbedaan tingkat pemahaman orang tua menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi berbasis komunitas. Sumber daya mencakup anggaran, tenaga pendidik, dan fasilitas sekolah.

Tabel 2. Ketersediaan Sumber Daya

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Kejelasan anggaran	72	Sedang
Kecukupan tenaga guru	78	Tinggi
Fasilitas pembelajaran	65	Sedang
Sarana administrasi	70	Sedang

Rata-rata Sumber Daya: 71,25% (Sedang)

Tabel Analisis (Deskripsi) menunjukkan fasilitas pembelajaran memiliki nilai terendah (65%). Sekolah di wilayah pinggiran mengalami keterbatasan sarana seperti media pembelajaran digital.

Analisis Ketersediaan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Walaupun anggaran tersedia, distribusi dan optimalisasi belum merata. Hal ini memengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Variabel Disposisi (Sikap Pelaksana). Disposisi mencerminkan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan.

Tabel 3. Disposisi Pelaksana Kebijakan

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Komitmen Kepala Sekolah	90	Tinggi
Dukungan guru	84	Tinggi
Motivasi pelaksana	75	Sedang
Transparansi Pengelolaan Dana	68	Sedang

Rata-rata Disposisi: 79,25% (Tinggi)

Tabel Analisis (Deskripsi) di atas memperlihatkan komitmen kepala sekolah sebagai faktor dominan (90%). Namun transparansi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan.

Analisis Sikap positif pelaksana kebijakan menjadi faktor pendorong keberhasilan. Meski demikian, aspek transparansi memerlukan sistem monitoring yang lebih kuat agar akuntabilitas tetap terjaga. Variabel Struktur Birokrasi, Struktur

birokrasi berkaitan dengan SOP, koordinasi, dan mekanisme pelaporan.

Tabel 4. Struktur Birokrasi

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Kejelasan SOP	80	Tinggi
Koordinasi Antar Lembaga	74	Sedang
Sistem pelaporan	72	Sedang
Pengawasan Internal	70	Sedang

Rata-rata Struktur Birokrasi: 74% (Sedang–Tinggi)

Grafik Analisis (Deskripsi) Tabel diatas menunjukkan SOP sudah cukup jelas, namun sistem pengawasan internal masih perlu penguatan.

Analisis Struktur birokrasi relatif stabil, tetapi belum sepenuhnya mendukung efektivitas maksimal kebijakan. Pengawasan dan koordinasi perlu ditingkatkan melalui sistem digitalisasi pelaporan.(Noviyanti et al., 2025)

Analisis Komprehensif Model Edward III

Tabel 4. Rekapitulasi Keseluruhan Variabel

Variabel	Rata-rata (%)	Kategori
Komunikasi	82,75	Tinggi
Sumber Daya	71,25	Sedang
Disposisi	79,25	Tinggi
Struktur Birokrasi	74	Sedang

Tabel komparatif di atas menunjukkan:

- Komunikasi menjadi variabel paling kuat
- Sumber daya menjadi variabel paling lemah
- Disposisi dan struktur birokrasi berada pada kategori menengah–tinggi

Analisis Kendala Berdasarkan model Edwards III, hambatan utama terletak pada:

- Resources (Sumber Daya) → dana dan SDM belum sepenuhnya memadai.
- Communication (Komunikasi) → belum tersosialisasi secara utuh.
- Bureaucratic Structure → prosedur administratif memperlambat realisasi program.

Temuan ini juga didukung penelitian internasional yang menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan efektif meningkatkan akses, namun sering menghadapi tantangan pembiayaan dan kualitas (Solehudin et al., 2024).

Faktor Pendukung Implementasi

Tabel 5. Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Faktor Pendukung	Indikator	Dampak Positif
1	Komitmen Pemda	Alokasi APBD stabil	Keberlanjutan program
2	Kepemimpinan Sekolah	Transparansi laporan	Kepercayaan publik meningkat
3	Partisipasi Komite	Pengawasan aktif	Akuntabilitas terjaga
4	Digitalisasi Administrasi	Pelaporan berbasis sistem	Efisiensi proses

Analisis Faktor Pendukung. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh:

- Kejelasan tujuan kebijakan,
- Dukungan politik,
- Kapasitas lembaga pelaksana.

Dalam penelitian ini, dukungan pemerintah daerah dan kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor dominan keberhasilan implementasi.

Dampak terhadap Akses dan Mutu Pendidikan

Evaluasi dampak dianalisis berdasarkan indikator kualitatif terhadap mutu Pendidikan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6. dampak terhadap mutu Pendidikan

Tahun	Nilai Rata-Rata
2019	72
2020	73
2021	74
2022	75
2023	76
2024	77
2025	78

Nilai rata-rata meningkat secara gradual sebesar 6 poin dalam 7 tahun. amun peningkatan ini tergolong moderat, bukan signifikan drastis. Artinya:

- Akses meningkat pesat,
- Mutu meningkat secara bertahap.

Dalam perspektif evaluasi pembelajaran, Benjamin S. Bloom menekankan bahwa kualitas pendidikan harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara itu, pendekatan evaluasi kebijakan dari Michael Scriven

menyatakan bahwa kebijakan harus dinilai dari outcome substantif, bukan sekadar output administratif. (Siddik et al., 2025)

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mamuju berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata keseluruhan 76,81%. Keberhasilan utama ditopang oleh komunikasi dan komitmen pelaksana, sementara tantangan terbesar terletak pada aspek sumber daya dan pengawasan birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mamuju menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan pendidikan gratis berada pada kategori cukup efektif dengan capaian rata-rata 76,81%. Kebijakan telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa.
- b. Implementasi kebijakan pendidikan gratis didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang transparan dan partisipatif, (3) keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan, serta (4) sistem administrasi yang mulai terdigitalisasi. Faktor-faktor ini memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat, antara lain: (1) keterbatasan dan ketidaktepatan alokasi anggaran, (2) keterlambatan pencairan dana, (3) meningkatnya rasio guru-siswa akibat bertambahnya jumlah peserta didik, (4) belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta (5) persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan gratis.
- c. Kebijakan pendidikan gratis terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah peserta didik, menurunnya hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, serta berkurangnya risiko putus sekolah. Dengan demikian, kebijakan ini efektif dalam memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Saran Kebijakan

- a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dan pemerataan anggaran pendidikan.
- b. Penguatan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana.
- c. Penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan pendidikan gratis.

Saran Praktis untuk Sekolah

- a. Meningkatkan komunikasi partisipatif dengan orang tua siswa.

- b. Mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan untuk peningkatan fasilitas pembelajaran.
- c. Mengembangkan sistem pelaporan internal yang lebih sistematis dan terdokumentasi.

Saran Akademik

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan jenjang pendidikan.
- b. Diperlukan pendekatan metode campuran (mixed methods) untuk memperdalam analisis kuantitatif dan kualitatif.
- c. Penelitian komparatif antar kabupaten dapat dilakukan untuk melihat variasi implementasi kebijakan pendidikan gratis di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2020). Public Policy Implementation: Study on Educational Budgeting of Palopo. *Journal La Sociale*. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i1.19>
- Anggraini, H., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393>
- Da Silva Santos, K., Ribeiro, M., De Queiroga, D. E. U., Da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia & Saude Coletiva*, 25 (2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Datnow, A., Guerra, A., Cohen, S., Kennedy, B., & Lee, J. (2023). Teacher Sensemaking in an Early Education Research–Practice Partnership. *Teachers College Record*, 125, 66–98. <https://doi.org/10.1177/01614681231161391>
- Hamilton, A., & Finley, E. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Kania, I., Geusan, G., Raturahmi, L., Ulumudin, A., Rustiana, E., & Budiman, M. (2019). THE ANALYSIS OF THE VILLAGE LAW IMPLEMENTATION POLICY BY USING EDWARD III MODEL APPROACH IN GARUT. *The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding*. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13735>
- Mezmir, E. A. (2020). Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>
- Noviyanti, W., Humaydiy, A. A., & Duriyat, M. (2025). The Role of Bureaucracy in the Implementation of Education Policy. *TOFEDU: The Future of Education Journal*. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.543>
- Pendidikan, K., Konstitusional, S. H., Palguna, I., Bima, D., Atmaja, K. D., Internasional, D. H., Negara, D., & Hukum, F. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>
- Siddik, A., Fadillah, A. Al, Sitepu, E. B., Ihsan, F. A., & Ratih, I. S. (2025). Taxonomy of Educational Goals and Evaluation of Learning Outcomes. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.56495/jrip.v5i1.834>
- Solehudin, R. H., Budiarti, E., & Khuluqo, I. (2024). ANALYSIS OF THE IMPACT OF FREE EDUCATION POLICY ON INCREASING ACCESS AND QUALITY OF EDUCATION IN JAKARTA. *Proceedings of the International Conference on Social Studies Education (ICoSSE)*. <https://doi.org/10.20414/icosse.v1i1.4>
- Sumbodo, W., Pardjono, Samsudi, & Rahadjo, W. D. (2018). Implementation of partnership management model of SMK (Vocational High School) with existing industries in mechanical engineering expertise in Central Java. 1941, 20038. <https://doi.org/10.1063/1.5028096>
- Zahroh, V. A. (2025). Free but Not Fair? Analyzing the Implementation of Free Education Policy in Malang City through a Justice-Oriented Framework. *PANGRIPTA*. <https://doi.org/10.58411/jn2nqc13>